

Social Distance dan Social Conflict di Tengah Covid-19

Social Distance and Social Conflict in Pandemic Covid-19

Budiman Widodo¹

Program Pasca Sarjana Universitas Surakarta

Email : budimanwidodo5@gmail.com

ABSTRACT

The COVID 19 epidemic struck in almost all countries in the World, where until now there has been no vaccine and no cure, it is estimated to have caused 7.2 million people to be infected and 400,000 dead, and there are no signs of a downward trend even that has actually worsened in most Country. Prevention and mitigation efforts are carried out by each country with the policies of each country. But in general, implementing social distance policies to inhibit transmission. Indonesia is among those adopting social distance policies, with the adoption of Large Scale Social Restrictions which emphasizes avoiding the crowd that is popular with the policy of staying at home. Problems arise because of the traditions and culture of Indonesian people who like to gather. This research with survey data sources from the mass media and social media with online interviews. The results of this study indicate that people find it difficult to implement a stay at home because of the cessation of income sources, hence there are several cases of diverse social conflicts. Finally, the violation policy was carried out with the consequence of increasing cases of Covid 19.

Keywords: *Social Distance, Social Conflict, COVID Policy 19*

ABSTRAK

Wabah COVID 19 melanda di hampir seluruh Negara di Dunia, dimana hingga saat ini belum ada vaksin dan obatnya, diperkirakan telah menyebabkan 7,2 juta orang terinfeksi dan 400.000 meninggal dunia, dan belum ada tanda-tanda penurunan tren bahkan yang terjadi justru memburuk di kebanyakan Negara. Usaha pencegahan dan penanggulangan dilakukan oleh masing-masing Negara dengan kebijakan masing-masing Negara. Namun secara umum menerapkan kebijakan social distance untuk menghambat penularannya. Indonesia termasuk yang mengadopsi kebijakan social distance, dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menekankan untuk menghindari kerumunan yang populer dengan kebijakan tinggal dirumah. Problem muncul karena tradisi dan budaya masyarakat Indonesia yang senang berkumpul. Penelitian ini dengan sumber data survey dari media massa dan medsos dengan wawancara secara online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kesulitan untuk menerapkan program tinggal dirumah karena faktor terhentinya sumber pendapatan maka muncul beberapa kasus terjadi konflik sosial yang beragam. Akhirnya kebijakan pelanggaran dilakukan dengan konsekwensi meningkatnya kasus Covid 19.

Kata Kunci : Jarak Sosial, Konflik Sosial, Kebijakan COVID 19

PENDAHULUAN

Tiada hari surat kabar tanpa berita Covid 19 sejak empat bulan terakhir menjadi head line di semua surat kabar di Indonesia. Sejak bermunculnya VIRUS SARS jenis baru di Desember 2019, Dunia mulai tersentak dan menaruh perhatian besar akan penyebaran jenis Virus Corona baru. Saat itu pemerintah langsung bergerak cepat untuk menangani kasus ini. Kebijakan langsung di ambil oleh Pemerintah Tiongkok akan memberlakukan kebijakan yang tidak pernah kita dengar lebih dari satu abad (1918) sejak muncul wabah kolera yang menewaskan sekitar 1,5 juta warga Spanyol saat itu. Kebijakan berupa isolasi kota Wuhan yang langsung menutup akses kota Wuhan, tanpa adanya Transportasi Umum dengan meniadakan Transportasi Umum untuk sebuah Negara seperti Tiongkok sudah cukup efektif karena hampir di pastikan tidak akan ada gelombang protes oleh Rakyat di Tiongkok, sistem pemerintah terpusat model Tiongkok sangatlah memungkinkan melakukan kebijakan Radikal semacam ini.

Ketika kebijakan “isolasi kota” di Negara yang dulu di kenal sebagai Negara tirai bambu, tidaklah mengejutkan, namun soal itu penulis berfikir dan membayangkan, bagaimana kebijakan isolasi diri harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. WHO sudah memprediksi wabah Virus CORONA baru akan menyebar ke seluruh penjuru dunia, mengingat penularan jenis virus ini sangat massif dan mudah menjangkit Penduduk seluruh dunia yang sudah mengglobal ini. Namun saat ini penulis masih berfikir panjang, belajar dari penyebaran virus yang terdahulu seperti , SARS, MERS, dan flu burung yang dapat segera di atasi tanpa kasus seperti yang di lakukan di kota Wuhan, namun setelah wabah Virus corona mulai merambah ke Negara lain seperti Jepang, Korea, Iran, Italia (Sekarang sudah menyebar ke ratusan Negara dan teritory), barulah kita sadar betapa dahsyatnya penyebaran virus corona jenis baru ini. Empat Negara tersebut sengaja kami sebut sebagai proses awal yang memaksa Negara- Negara lain di dunia baru mulai tersentak akan kedahsyatan penyebaran Virus ini. Indonesia merupaka Negara keberapa mulai mendeklaim sebagai Negara yang sudah terpapar jenis Virus ini, tidak ada data yang pasti sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Maret 2020, ada kasus positif WNI meninggal karena jenis Virus Corona baru di Kota Depok, mulai saat itu rakyat Indonesia boleh dikatakan memasuki fase dimana Indonesia “tiada hari” tanpa membicarakan corona dengan berbagai macam persoalan dan sudut pandang yang beraneka ragam. Semua elemen dari segala lini fokus terhadap “ penagganan wabah wirus corona (SARS jenis baru) ini.

Beberapa prediksi wabah COVID 19 yang telah di tetapkan sebagai pandemi, baik dari sisi waktu maupun jumlah yang terkena sangatlah mencengangkan. Ada yang menggunakan model penularan wabah ini seperti deret ukur, dan bila prediksi ini terjadi tanpa disertai intervensi pemerintah maka pada akhir bulan april akan terjadi lebih dari 71 ribu kasus yang terkena virus Corona.(Kompas, Maret - 2020). Dalam tulisan ini penulis akan fokus pada intervensi pemerintah dalam menangani wabah virus Corona(COVID 19) dalam konteks sifat dan ciri- ciri sosial masyarakat Indonesia. Model kebijakan yang telah dilakukan maupun apa yang akan dilakukan dalam menangani wabah virus corona tanpa melibatkan dari pada masalah pro dan kontra akan tetapi bagaimana dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang telah tumbuh berkembang selama ini menyamakan presepsi dalam penanganan wabah virus corona ini, tentu saja “ kearifan lokal” dapat di dijadikan sebagai pijakan untuk membuat kebijakan baik lokal maupun nasional.

Setelah hampir satu bulan perjalanan virus corona (Covid 19) masuk Indonesia, berkembang berbagai isu kebijakan baik bersifat lokal maupun nasional. Istilah “ lockdown” menjadi perdebatan yang mewarnai dalam kebijakan penanganan Covid 19. Belajar dari Negara Tiongkok dengan kebijakan isolasi kota Wuhan dimana kota ini merupakan awal penyebarannya di nilai berhasil, karena di Tiongkok terjadinya kasus baru COVID 19, sudah hampir tidak terjadi. Kemudian Jepang dan Korea (karena di nilai masyarakat sangat disiplin,

kasus Corona baru juga sangat minim, kemudian juga Singapura, Taiwan, bahkan Vietnam berhasil meniadakan angka kematian akibat Virus Corona menjadi 0. Di bandingkan dengan Negara -Negara di Eropa Barat dan AS yang Masyarakatnya di nilai kurang disiplin, angka tingkat penyebaran virus ini sangat tinggi. Data yang di rilis organisasi kesehatan dunia (WHO) hingga 10 juni 2020 menyebutkan angka lebih dari 7,2 juta orang terinfeksi Covid 19, dan menyebabkan 400 ribu orang meninggal. Secara umum Dirjen WHO menyebutkan tren secara global terus memburuk. Indonesia pada tanggal 9 juni 2020 menunjukkan tren yang terus meningkat mencapai angka tambahan 1043 kasus baru positif Covid 19, untuk pertama kalinya menembus angka 1000 kasus positif Covid 19 perhari. Ada 2 pendapat yang mengatakan kenaikan kasus Covid 19 baru di sebabkan, pertama karena gencarnya tracing (pelacakan) dengan rapid tes, kedua karena faktor mulai longgarnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui kebijakan normal baru (New Normal).

COVID 19 tidak hanya mengancam jiwa manusia tetapi telah merusak hampir semua sektor kehidupan, utamanya perekonomian yang berdampak langsung terhadap munculnya konflik sosial, Erwan Agus Putranto hal, Kompas 28 mei 2020.

METODE

Penelitian ini adalah survei dengan metode pengambilan data lewat media baik surat kabar, media TV, dan medsos, maupun pengambilan data primer lewat wawancara langsung secara online. Selanjutnya analisis data secara kualitatif. sampel mengambil berita-berita utama dari koran, majalah dan beberapa kasus yang menyangkut Covid- 19, kaitannya dengan pembatasan sosial berupa respons masyarakat terhadap kedatangan warga asal luar daerah, kota-kota besar khususnya yang berujung pada terjadinya ketegangan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam teori sosiologi, disebutkan manusia memiliki karakter untuk bersosialisasi dengan sesamanya, karena manusia diciptakan tidak bisa hidup sendiri memiliki saling ketergantungan, dan sering disebut sebagai makhluk sosial. Mereka hidup saling membutuhkan, sehingga muncul kerjasama diantara mereka. Hidup mereka cenderung berkelompok dan membuat satu komunitas yang didasari oleh tiga hal yaitu seperasaan, senasib, dan sepenanggungan. Ikatan batin diantara mereka sangatlah kuat hal ini ditandai adanya kohesi sosial berupa solidaritas yang tinggi diantara mereka. Dalam situasi wabah covid 19, yang melanda di hampir belahan Negara di dunia, tren solidaritas yang berupa aktivitas saling membantu diantara mereka sangatlah kuat. Munculnya kelompok sosial diluar struktur sosial yang melembaga banyak kita jumpai. Salah satu contoh adanya kelompok alumnus dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Sosial bernama GENDULI Galanggang Peduli Petani yang melakukan gerakan membantu menjual sayur petani di lereng Gunung Merapi dan Merbabu di Kota Boyolali Jawa Tengah.

Adanya gerakan yang bersifat spontan dan temporer khususnya saat terjadinya bencana memang tidak bisa dihindari, solidaritas yang menguat disaat-saat terjadinya musibah atau sejenisnya adalah merupakan sebuah Realitas Sosial, teori challenge and response dimana pada saat manusia menghadapi tantangan dan ancaman bersama dari luar berlaku, seperti kondisi wabah covid 19 saat ini. Perasaan senasib, sepenanggungan dan seperasaan sangat kental mewarnai kenyataan yang amat berbeda terjadi pada saat manusia harus menjaga jarak, baik sosial maupun secara fisik. Social Distance yang kemudian dipertegas menjadi social physic, merupakan protokol kesehatan utama untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Virus Corona alias (Covid 19) saat ini. Kondisi dan aturan yang harus kita lakukan sangatlah rumit dan sulit, mengingat karakter sosial masyarakat Indonesia, yang bersifat masyarakat gesellschaft, masyarakat paguyuban yang mempunyai ikatan emosi sosial sangat tinggi.

Protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, setidaknya ada tiga persyaratan yang harus dilakukan, yaitu jaga jarak yang dimaknai tinggal di rumah saja dan hindari kerumunan, pakai masker dan sering cuci tangan pakai sabun. Untuk yang kedua dan ketiga relatif mudah diaplikasikan karena secara teknis kesehatan tidaklah sulit. Jenis virus corona baru ini sangat lemah tapi cerdas, jenis Sars-Cov-2 dicelupkan dalam air sabun saja sudah ambyar RNA sebagai intinya pun akan berkeping-keping, akan tetapi dia juga merupakan makhluk yang cerdas, sekali mendapat kesempatan hinggap dalam sel inang yang cocok virus ini sulit dikendalikan. Untuk membunuh manusia, dia tak perlu otot yang kuat cukup menyumbat saluran pernapasan dengan gelembung lender (Zeily Nuradiman, Kompas 4-6-2020 hal 15).

Wabah covid 19 tidak bisa disamakan dengan virus-virus generasi sebelumnya seperti SARS, MERS, maupun flu burung. Dari aspek medis, disamping belum ada vaksin dan obatnya, juga tingkat penularan jenis COVID- 19 sangat massif dan cepat. Perdebatan angka kematian virus corona jenis baru yang relative lebih sedikit dibandingkan angka kematian yang disebabkan Demam Berdarah atau bahkan angka Kematian Kecelakaan Lalu lintas, tidaklah tepat.

(Anis Baswedan WEBNAR : Relasi pusat dan daerah dalam mengatasi covid- 19 : LIPI:Politik@mail.lipi.go.id). Langkah bijak pemerintah maupun masyarakat adalah penyamaan persepsi, bahwa harus ada kemauan dan kesadaran bahwa wabah Covid 19 merupakan bencana nasional yang bersifat global, tentu saja tetap mengikuti protokol standar WHO, yang berlaku terhadap seluruh Negara di Dunia, pada tataran jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan menunjukkan, bahwa masih di jumpai orang yang tidak menggunakan masker, dengan alasan kurangnya kesadaran dan merasa tidak takut terhadap penyebaran Virus Covid- 19, dan sebagian besar beralasan tidak punya masker dan kalau membeli dan harus sering ganti menjadi repot dan pertimbangan keuangan yang harus dikeluarkan, sedangkan untuk cuci tangan dengan sabun, sudah cukup banyak masyarakat yang sudah menyediakan tempat cuci tangan dan sabun yang di butuhkan, untuk yang jaga jarak banyak kita jumpai kedisiplinan masyarakat masih kurang.

Dari pengamatan yang dilakukan dan fenomena yang tumbuh di masyarakat menunjukkan persoalan jaga jarak (social distancing) menjadi masalah baru soal yang menuntut kerja ekstra bagi berbagai pihak. Dari sisi pendekatan sosial, kebiasaan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat paguyuban tidak dapat di lepaskan dan tradisi atau budaya untuk sering bertemu dan berkumpul tanpa adanya sekat- sekat jarak baik fisik maupun emosional. Tradisi bersalaman, saling berkunjung, berkerumun, punya hajat, atau bahkan kegiatan keagamaan cenderung tanpa jarak. Hal ini membuat masyarakat Indonesia sangat asing dan terkekang dengan peraturan jaga jarak. Merubah kebiasaan seperti ini bukanlah pekerjaan mudah. Bisa di bayangkan dalam satu rumah tangga bisa terjadi percekocokan dan ketegangan untuk menerapkan aturan pencegahan Covid- 19 ini. Apalagi ditempat umum atau di tempat- tempat kerja atau pusat- pusat keramaian yang melibatkan banyak orang, protocol yang harus di ikuti oleh kantor- kantor seperti keputusan menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 sbb:

Pencegahan dan Pengendalian Covid- 19 di Tempat Kerja

1. Mewajibkan semua pekerja menggunakan
2. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu atau pengunjung yang memiliki gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek atau sesak
3. Menyediakan ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skiring dan memfasilitasi tempat
4. Melakukan pembersihan menggunakan pembersih dan disinfektan setiap 4 jam sekali
5. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC
6. Pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan.
7. *Self assessment* risiko Covid- 19 pada semua pekerja untuk memastikan dalam kondisi sehat
8. Melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk tempat kerja
9. pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke Negara atau daerah terjangkit Covid-19 diwajibkan melakukan karantina mandiri dirumah selama 14 hari.
10. menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari hunian ke tempat kerja.

Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. 01. 07/Menkes/328/2020; Diolah Litbang Kompas

Latar belakang dikelurkannya keputusan menteri tersebut diatas dimaksudkan sebagai jalan tengah untuk mengatasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju Normal Baru (New Normal). Pelonggaran Kebijakan PSBB, merupakan pilihan yang sulit bagi Pemerintah mengingat keterbatasan anggaran pemerintah untuk menunjang kebutuhan warga masyarakat menjadi amat besar, maka kebijakan yang di ambil adalah Relaksasi dengan melonggarkan PSBB. Di harapkan dengan kebijakan pelonggaran ini, masyarakat sudah dapat melalukan aktivitas ekonomi lagi dengan konsekuensi aspek keselamatan kesehatan menjadi taruhannya.

Social Conflict

Karakter Covid- 19 yang begitu masiff dalam penularannya melalui kontak fisik antar manusia membuat intersksi sosial mengalami perubahan dan adaptasi. Rekomendasi yang ditawarkan dengan kebijakan jaga jarak banyak dilakukan oleh berbagai Negara, termasuk Indonesia yang menerapkan kebijakan PSBB kemudian di relaksasi dengan penerapan

transisi PSBB. Pilihan kebijakan ini bukannya tanpa resiko akan bertambahnya kasus positif Covid- 19. Dengan pertimbangan masalah ekonomi dan keselamatan kesehatan, dua hal yang di lematiskan akhirnya menjadi Nomal Baru, menjadi kebijakan Pemerintahan baru mulai minggu pertama bulan Juni 2020 di terapkan. Melalui kehidupan model baru bukan perkara gampang bagi masyarakat Indonesia, proses adaptasi butuh waktu dan kesadaran serta kedisiplinan, utamanya dalam menjalankan SOCIAL DISTANCE.

Di lapangan social distance dalam usaha melawan Covid-19 terjadi benturan sosial yang tidak bisa di hindari. Pemasalahan jaga jarak baik sosial maupun fisik, di persepsikan bervariasi oleh masyarakat, menurut protokol kesehatan jaga jarak di artikan dengan batas jarak minimal 1 meter namun kenyataan aplikasi ini sangat sulit di terapkan, seperti dipasar trsdisional, stasiun, terminal ataupun mall sekalipun. Kemudian masih belum dibukanya portal- portal ataupun penutup pintu jalan- jalan di daerah untuk orang luar masuk diwilayahnya, hal ini sering menimbulkan ketegangan bagi warga itu sendiri ataupun dengan masyarakat dari luar. Dari hasil wawancara dengan beberpa warga yang tidak setuju jalan masuk wilayah di tutup. Hasil wawancara dengan warga di wilayah Ampel, Boyolali bernama Bapak Nasikin dan Subchan

“mengatakan jalan di depan rumahnya tidak di tutup untuk pengguna jalan, karena banyak orang yang merupakan jalan satu satunya akses bagi penduduk antar desa, meskipun ada warga yang mengusulkan jalan tersebut ditutup”

Disinilah para aparat desa dan tokoh- tokoh masyarakat memegang peran yang sangat besar untuk mencegah terjadinya benturan konflik antar warga.

Benturan kepentingan antara menjaga keselamatan kesehatan dengan kebutuhan biaya hidup memang harus disikapi secara bijak. Dari sisi psikologi sangat mungkin orang akan dengan mudah tersulut emosinya, kasus terbaru pengambilan jenazah terindikasi Covid- 19 secara paksa di Sukawesi Selatan merupakan contoh kongkrit terjadinya konflik sosial. Bila pemerintah tidak hati- hati dan bijak dalam mengelola psikologi sosial, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik sosial dalam eskalasi yang meluas. Terjadinya pengolokan terhadap petugas kesehatan, masuk wilayah yang terindikasi adanya orang positif Covid- 19 karena merasa malu dan akan dikucilkan oleh tetangga perlu pendekatan psikologi sosial. Atau bahkan yang terjadi sebaliknya masyarakat di suatu wilayah tidak boleh dimasuki orang dari luar karena khawatir akan menyebarkan virus Corona, seperti yang dikemukakan oleh ketua RT di wilayah Desa Winong kecamatan kota Boyolali, dengan menyatakan “tidak menerima oleh- oleh virus dari luar kota ..” kata yang bernada penolakan ini merupakan bentuk perlawanan yang bisa berujung pada konflik sosial, dimana orang kota dianggap sebagai pembawa virus tanpa pandang bulu.

Bentuk perlawanan bernada rasa kesal juga muncul dari kalangan tenaga medis dengan tagar #TERSERAH yang lebih menunjukkan ekspresi rasa kejengkelannya terhadap masyarakat yang tidak menghiraukan himbauan Pemerintah berupa tinggal dirumah saja. Dimana masih terjadi banyaknya kerumunan disaat masih di berlakukannya PSBB, yang membuat pencegahan penularan Covid- 19 sulit mencapai hasil yang sesuai dengan yang di harapkan, bahkan cenderung terus meningkat. Terjadinya banyak konflik- konflik sosial dimasa pandemi Covid- 19 memang tidak terhindarkan. Dalam teori Kebijakan publik, Fredericson (1997), Den hart and Den hart (2003) memperkenalkan perubahan paradgmana dari paradigm klasik ke pardigma baru yang populer di sebut dengan “governance”. Pemikiran Governance dilandasi semangat, bahwa pemerintah tidak lagi dominan dalam pengambilan kebijakan, tetapi di bantu oleh pilar society dar pilar privat. Dalam pengambilan kebjakan dalam menanggapi dan mencegah covid- 19 ini, pemerintah jangan di biarkan bekerja sendiri, masyarakat harus berkontribusi untuk melakukan action dalam bentuk solidaritas sosial maupun berkomitmen. Bahwa pandemi Covid- 19 merupakan masalah bersama bahkan bersifat global dan dapat mengancam kehidupan manusia. Di pihak lain

peran pihak swasta, para pengusaha bahu membahu menggulurkan tangan, ikut berpartisipasi dalam penanganan Covid- 19 lewat bantuan dana yang disalurkan melalui pemerintah maupun langsung pada masyarakat yang membutuhkan. Namun kata kuncinya Negara harus hadir dalam penanganan Covid- 19, bahkan bagi Negara- Negara dunia ke tiga pada umumnya melakukan intervensi kebijakan. Alford dan Frieland (1990) dalam bukunya *Power of Theory* mengemukakan betapa pentingnya hubungan antara Negara dan masyarakat dimana faktor dimensi sosial menjadi kunci penentu dalam sebuah Negara.

Dalam sebuah kebijakan Negara pasti ada pro dan kontra, dalam sebuah Negara demokrasi perbedaan pendapat sah- sah saja, namun perbedaan yang terjadi hendaknya di sikapi secara bijak, yang besar mau mendengar yang kecil dan sebaliknya yang kecil juga bisa menerima dengan lapang dada dalam menyikapi “ Tinggal dirumah saja”, kita jangan iri terhadap mereka yang bisa nyenyak bisa tinggal dirumah, namun kita jangan marah kepada mereka yang tetap diluar karena harus mempertahankan hidup (kata- kata bijak yang banyak beredar disosmed). Prinsip dasar kebijakan Publik adalah pilihan dari sekian alternatif, di harapkan kebijakan adalah pilihan yang terbaik. Grindle Mirele S (1980). Mengeluarkan, bahwa terjadi konflik Birokrasi dan public dalam penentuan kebijakan yang pada hakekatnya merupakan agenda seting. Ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan.

KESIMPULAN

Covid-19 dinyatakan sebagai pandemic oleh WHO Sejak Maret 2020, hal ini menunjukkan bahwa pemimpin Covid-19 harus mengikuti Protokol Kesehatan yang di tetapkan WHO. Dengan munculnya wabah Covid-19 yang melanda dihampir seluruh Negara di Dunia, maka seluruh Negara Fokus terhadap Covid-19 ini, meskipun melalui eskalasi dan penanganan sesuai kemampuan masing- masing. Secara umum protokol yang di lakukan oleh Negara- Negara di dunia termasuk Indonesia, adalah social distance, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Social distance (jaga jarak) merupakan hal yang paling sulit untuk di implementasikan, mengingat aktivitas manusia yang tidak terlepas dengan kegiatan yang melibatkan banyak orang secara fisik, meski teknologi dapat mampermudah orang melakukan komunikasi, tapi kegiatan yang membutuhkan instruksi sosial sulit untuk digantikan oleh teknologi, yang dapat melakukan teknologi hanya mengurangi terjadinya kontak fisik.

Proses Adaptasi Sosial, memerlukan waktu panjang, kesadaran, kepatuhan, dan kedisiplinan masyarakat, kita sadar dinamika sosial masyarakat tetap butuh ruang untuk berinteraksi sosial, yang bisa dilakukan adalah memperkecil ruang gerak interaksi sosial untuk meminimalisasi penularan Covid-19. Tempat- tempat umum yang menjadi tempat ruang interaksi publik perlu pengaturan melalui kebijakan yang diterapkan oleh masing- masing Pemerintah Kota atau Kabupaten secara ketat adalah kemustahilan melarang orang untuk berinteraksi sosial, kebijakan pembatasan sosial merupakan jalan tengah yang dilakukan. Dilema antara menjaga keselamatan jiwa dan memenuhi kebutuhan hidup berjalan parallel.

Konsekuensi pilihan antara kesehatan dan kebutuhan hidup sendiri memunculkan konflik sosial yang terjadi di berbagai tempat. Terjadinya ketegangn sosial merupakan hak yang harus diantisipasi, faktor kejenuhan di tambah tekanan ekonomi akan membuat orang mudah terbakar emosinya. Dampak Sosial – Ekonomi kalau tidak di tanggani secara serius juga akan berakibat lebih parah, yang justru akan menambah semakin rumit penanganan Covid- 19. Protokol putus mata rantai penularan Covid- 19, yang di pandang satu- satunya cara penanganan penularan wabah memerlukan pendekatan sosial yang harus melibatkan semua stake holder mulai dari Pemerintah, Masyarakat, dan tokoh –tokoh masyarakat lintas agama, mengingat hampir semua sektor kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari interaksi sosial. Komunikasi intens berupa komunikasi dua arah yang baik, di harapkan dapat

mengurangi terjadinya distorsi yang berakibat pada kesalah pahaman yang dapat menimbulkan konflik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Alford.R, & Friend, R 1990. *Power of Theory, Capitalis, the State, and Democracy*, Cambridge University, California

Denhard, Janet V. and Robert D. Denhardt. 2003, *The New Public Servics: Serving, not Steering*, M.E. Sharpe.

Fredericson, 1997, *the Spirit Of Public Administration*, Jossey-Bass Publishers San Fransisco,

Mirele S Grindle, 1980, *Public Choises and Policy Change*, The Johns Hopkins University Press Baltimore and London

Moleong, L.J., 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Osborne, D. & Gabbler, T, 1992. *Reinventing Government*, A Plume Book. California

KOMPAS, 26 maret 2020

KOMPAS, 26 mei 2020

WEBNAR, Relasi pusat dan daerah dalam mengatasi covid- 19 : LIPI:
Politik@gmail.lipi.go.id